



*Rudy C Tarumingkeng* : *Inflasi Pangan dan Daya Beli Masyarakat:  
Tantangan Nyata Ekonomi Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

4 Maret 2026

## **INFLASI PANGAN DAN DAYA BELI MASYARAKAT: TANTANGAN NYATA EKONOMI INDONESIA**

### **Pendahuluan**

Dalam banyak perdebatan ekonomi, inflasi sering dibahas sebagai angka agregat: 2 persen, 3 persen, atau 5 persen. Akan tetapi, bagi rumah tangga biasa, inflasi bukan pertama-tama sebuah angka statistik. Inflasi dirasakan ketika harga beras naik, cabai melonjak, daging ayam lebih mahal, dan uang belanja mingguan terasa cepat habis. Karena itu, ketika kita berbicara tentang ekonomi Indonesia, salah satu persoalan yang paling nyata sesungguhnya bukan sekadar inflasi umum, melainkan **inflasi pangan** dan implikasinya terhadap **daya beli masyarakat**. Tema ini sangat penting karena ekonomi Indonesia pada 2025 memang tetap tumbuh **5,11 persen**, tetapi stabilitas makro tidak otomatis berarti tekanan hidup sehari-hari menghilang dari rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data mutakhir menunjukkan nuansa yang perlu dibaca secara hati-hati. Pada **Desember 2025**, inflasi nasional tercatat **2,92 persen** secara tahunan. Namun pada bulan yang sama, kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** justru mengalami inflasi **4,58 persen** secara

tahunan. Lalu pada **Februari 2026**, menurut BPS kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** masih mengalami inflasi **3,51 persen** secara tahunan, sementara Bank Indonesia mencatat komponen **volatile food** mencapai **4,64 persen** secara tahunan. Ini berarti, bahkan ketika inflasi umum tampak masih dalam kisaran yang dapat dikelola, tekanan dari pangan tetap berada di atas headline inflation dan lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Masalah ini menjadi lebih serius karena struktur pengeluaran rumah tangga Indonesia masih sangat sensitif terhadap pangan. Data BPS untuk 2025 menunjukkan bahwa secara nasional **49,42 persen** pengeluaran per kapita per bulan masih dialokasikan untuk makanan; di perkotaan angkanya **46,04 persen**, dan di perdesaan bahkan **56,85 persen**. Dengan struktur seperti itu, sedikit saja kenaikan harga pangan dapat langsung menggerus kemampuan rumah tangga untuk membiayai kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, tabungan, atau cicilan. Di sinilah inflasi pangan menjadi lebih dari sekadar isu harga: ia menjadi isu kesejahteraan, distribusi, dan stabilitas sosial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Esai ini berangkat dari tesis bahwa **inflasi pangan adalah tantangan nyata ekonomi Indonesia karena ia bekerja pada jantung kehidupan rumah tangga**. Ia tidak hanya memengaruhi angka konsumsi, tetapi juga kualitas gizi, strategi belanja, kemiskinan, ketimpangan, persepsi terhadap ekonomi, dan bahkan efektivitas pertumbuhan itu sendiri. Dalam kerangka itu, pembahasan berikut akan menelaah potret mutakhir inflasi pangan Indonesia, menjelaskan mengapa pangan lebih menentukan daripada inflasi umum dalam pengalaman hidup masyarakat, mengulas akar struktural masalahnya, serta merumuskan arah kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga daya beli secara berkelanjutan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

## 1. Memahami Inflasi Pangan dan Daya Beli

Secara konseptual, inflasi pangan adalah kenaikan harga bahan makanan dan komoditas konsumsi terkait pangan yang dikonsumsi rumah tangga. Dalam praktik kebijakan Indonesia, isu ini sering dibaca melalui dua lensa. Lensa pertama adalah kelompok pengeluaran **makanan, minuman, dan tembakau** dalam indeks harga konsumen BPS. Lensa kedua adalah komponen **volatile food** yang digunakan Bank Indonesia untuk membaca harga-harga yang sangat sensitif terhadap musim, cuaca, gangguan pasokan, dan momentum permintaan seperti hari besar keagamaan. Dua lensa ini tidak identik, tetapi keduanya sama-sama menegaskan bahwa pangan merupakan sumber tekanan harga yang paling dekat dengan pengalaman rumah tangga. ([BPS Web API](#))

Sementara itu, **daya beli** tidak sama dengan sekadar besarnya pendapatan nominal. Daya beli adalah kemampuan riil rumah tangga untuk memperoleh barang dan jasa setelah mempertimbangkan harga yang berlaku. Karena itu, pendapatan yang naik belum tentu berarti daya beli membaik jika harga kebutuhan pokok naik lebih cepat. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Agustus 2025 sebesar **Rp3,33 juta** per bulan, naik **1,94 persen** dari Agustus 2024. Namun pada saat yang sama, laju harga pangan pada akhir 2025 tetap berada di atas inflasi umum, sehingga bagi banyak rumah tangga kenaikan pendapatan nominal tersebut bisa terasa tidak cukup berarti di hadapan belanja pangan yang terus menekan anggaran bulanan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dengan demikian, persoalan inflasi pangan harus dibaca sebagai masalah **keseimbangan antara pendapatan dan struktur pengeluaran**. Bila rumah tangga menghabiskan hampir setengah pengeluarannya untuk makanan, maka kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, cabai, bawang, atau daging ayam akan menciptakan

tekanan yang sangat cepat. Rumah tangga mungkin tidak langsung jatuh miskin secara statistik, tetapi mereka bisa mengalami penurunan kualitas konsumsi, menunda pembelian gizi yang lebih baik, mengurangi protein hewani, menekan pengeluaran pendidikan anak, atau memperbesar ketergantungan pada utang konsumtif. Di titik itulah inflasi pangan menjadi sangat nyata secara sosial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

## **2. Potret Mutakhir Indonesia: Stabilitas Umum, Tekanan Pangan Khusus**

Potret terkini Indonesia memperlihatkan sebuah paradoks yang menarik. Dari sisi makro, lembaga-lembaga utama melihat ekonomi Indonesia cukup tangguh. IMF menilai pertumbuhan Indonesia tetap kuat, sekitar **5,0 persen pada 2025** dan **5,1 persen pada 2026**, sementara inflasi diproyeksikan tetap dalam sasaran. BPS bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi **5,11 persen** pada 2025, lebih tinggi daripada 2024. Ini memberi kesan bahwa perekonomian relatif sehat. Namun data harga menunjukkan bahwa kesehatan agregat ini tidak menghapus tekanan spesifik pada pangan. ([IMF](#))

Pada **November 2025**, inflasi tahunan Indonesia sebesar **2,72 persen**, tetapi kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** mengalami inflasi **4,25 persen** dan memberi andil terbesar terhadap inflasi, dengan cabai merah sebagai salah satu komoditas utama penyumbang tekanan harga. Sebulan kemudian, **Desember 2025**, inflasi umum menjadi **2,92 persen**, sementara kelompok pangan terkait masih berada di **4,58 persen**. Artinya, menjelang tutup tahun 2025, tekanan harga pada sektor yang paling dirasakan rumah tangga belum benar-benar mereda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Lalu pada **Februari 2026**, inflasi IHK tercatat **0,68 persen secara bulanan** dan **4,76 persen secara tahunan**. Namun Bank Indonesia menegaskan bahwa lonjakan tahunan tersebut sebagian dipengaruhi **low base effect** akibat kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga pada Januari–Februari 2025. Karena itu, headline inflation Februari 2026 perlu dibaca hati-hati. Justru yang penting untuk dianalisis adalah bahwa di bulan yang sama, inflasi **volatile food** tercatat **2,50 persen secara bulanan** dan **4,64 persen secara tahunan**, dipicu antara lain oleh **daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah** di tengah peningkatan permintaan Ramadan dan gangguan cuaca yang menekan pasokan. Jadi, meskipun headline inflation Februari 2026 sebagian terdistorsi faktor basis, tekanan pangan tetap nyata. ([Bank Indonesia](#))

BPS juga mencatat bahwa kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** pada Februari 2026 mengalami inflasi **3,51 persen** secara tahunan. Perbedaan antara angka **3,51 persen** dan **4,64 persen** tidak menunjukkan kontradiksi, melainkan perbedaan klasifikasi: yang satu adalah kelompok pengeluaran IHK yang lebih luas, sementara yang lain adalah komponen volatile food yang lebih sempit dan lebih sensitif. Keduanya justru sama-sama menunjukkan hal yang serupa: pangan masih menjadi sumber tekanan harga yang menonjol dan tidak dapat dianggap sekadar gejolak kecil. ([BPS Web API](#))

### **3. Mengapa Pangan Lebih Menentukan daripada Inflasi Umum?**

Secara teoretis, sebuah negara bisa memiliki inflasi umum yang moderat tetapi tetap menyaksikan keluhan masyarakat tentang biaya hidup. Hal ini terjadi ketika komponen-komponen yang paling sering dibeli masyarakat naik lebih cepat daripada komponen lain. Dalam kasus Indonesia, makanan mempunyai bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar. Rumah tangga mungkin tidak membeli perabot, elektronik, atau jasa tertentu setiap minggu, tetapi mereka membeli makanan

hampir setiap hari. Kenaikan harga pangan karena itu terasa lebih cepat dan lebih konkret daripada kenaikan harga pada komoditas lain. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data BPS memperkuat logika ini. Secara nasional pada 2025, hampir **setengah** pengeluaran per kapita bulanan digunakan untuk makanan, dan di pedesaan porsi nya lebih dari **separuh**. Itu berarti inflasi pangan bukan fenomena pinggiran. Ia menyentuh komponen terbesar dalam anggaran rumah tangga sehari-hari. Bagi rumah tangga perkotaan kelas menengah bawah, lonjakan harga pangan dapat mengurangi ruang untuk ongkos sekolah, transportasi kerja, atau biaya kontrakan. Bagi rumah tangga pedesaan, terutama yang bukan produsen pangan berskala memadai, harga pangan yang naik justru dapat memperberat biaya hidup meskipun mereka tinggal dekat sumber produksi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sini ada sebuah narasi sosial yang penting. Bayangkan seorang pekerja informal di kota satelit Jakarta atau Bandung yang pendapatannya relatif tetap dari minggu ke minggu. Ia mungkin tidak terlalu memperhatikan perubahan harga emas, tarif rekreasi, atau indeks jasa keuangan. Tetapi ketika harga cabai, telur, minyak goreng, dan ayam naik bersamaan, ia akan segera merasakan bahwa gaji atau pendapatan harian tidak lagi cukup longgar. Ia mulai mengurangi lauk, beralih ke kualitas pangan yang lebih rendah, atau menunda belanja nonpangan. Secara statistik ia belum tentu tergolong miskin, tetapi secara pengalaman hidup ia sedang mengalami penurunan daya beli. Pola seperti inilah yang menjelaskan mengapa inflasi pangan menjadi isu politik-ekonomi yang sangat sensitif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

#### **4. Akar Musiman: Cuaca, Ramadan, dan Volatilitas Pasokan**

Salah satu ciri inflasi pangan adalah sifatnya yang lebih volatil dibanding inflasi inti. Bank Indonesia secara eksplisit mencatat bahwa kenaikan

volatile food pada Februari 2026 didorong oleh kombinasi **permintaan Ramadan, perayaan tahun baru Imlek**, serta **gangguan cuaca** yang menekan pasokan. Dalam ekonomi pangan, ini bukan hal sepele. Pangan adalah sektor yang sangat bergantung pada ritme biologis, musim panen, curah hujan, logistik dingin, dan kecepatan distribusi. Karena itu, bahkan ketika kebijakan moneter cukup ketat dan inflasi inti masih terkendali, harga pangan dapat tetap melonjak karena persoalan yang berasal dari sisi pasok. ([Bank Indonesia](#))

Pengalaman 2025 juga menunjukkan bahwa faktor cuaca dapat bekerja ke dua arah. World Bank mencatat bahwa pada pertengahan 2025, kondisi iklim yang lebih menguntungkan membantu rebound produksi pangan dan ikut menahan tekanan harga. Ini berarti inflasi pangan bukan fenomena monolitik; ia dapat melemah bila produksi domestik membaik, dan dapat menguat kembali ketika cuaca memburuk atau distribusi terganggu. Dengan kata lain, Indonesia menghadapi masalah yang bersifat **musiman tetapi berulang**, sehingga penanganannya harus melampaui operasi pasar sesaat dan bergerak ke arah pembenahan sistem pangan. ([The World Bank](#))

Bagi banyak komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang, fluktuasi harga ekstrem juga sering disebabkan oleh struktur pasokan yang pendek tetapi rentan. Produksi terkonsentrasi di wilayah tertentu, panen tidak merata, informasi pasar tidak sempurna, dan kapasitas penyimpanan terbatas. Akibatnya, ketika terjadi gangguan cuaca atau lonjakan permintaan, harga di konsumen melonjak cepat. Sebaliknya, saat panen berlimpah, harga di tingkat produsen bisa jatuh tajam. Dalam pola seperti ini, inflasi pangan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencerminkan kelemahan kelembagaan pada rantai nilai pangan itu sendiri. ([Bank Indonesia](#))

## **5. Akar Struktural: Distribusi, Rantai Pasok, dan Ketergantungan pada Respons Jangka Pendek**

Kalau hanya dilihat sekilas, inflasi pangan tampak sebagai masalah produksi. Padahal sering kali ia adalah masalah **rantai pasok**. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan biaya logistik yang tidak seragam, konektivitas antardaerah yang belum sepenuhnya efisien, dan ketergantungan pada distribusi fisik untuk menjaga pasokan bahan segar. Dalam kondisi seperti itu, selisih harga antardaerah mudah melebar. Suatu wilayah bisa surplus, tetapi wilayah lain tetap mahal karena transportasi, informasi, penyimpanan, atau koordinasi distribusi tidak berjalan optimal. Bank Indonesia sendiri menekankan pentingnya strategi **4K**: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan. Penekanan pada distribusi menunjukkan bahwa masalah pangan bukan sekadar soal berapa banyak yang diproduksi, tetapi juga seberapa cepat dan merata pangan dapat dipindahkan ke pasar konsumsi. ([Bank Indonesia](#))

Di samping itu, kebijakan pangan Indonesia sering berada dalam tarik-menarik antara stabilisasi jangka pendek dan pembenahan jangka panjang. Saat harga melonjak, pemerintah cenderung mengandalkan operasi pasar, bantuan pangan, atau penguatan stok. Semua itu penting, bahkan sering mendesak. Akan tetapi, bila respons berhenti di sana, inflasi pangan akan terus datang berulang-ulang. Itu sebabnya Bank Indonesia dalam siaran pers Maret 2026 juga mengaitkan stabilisasi harga dengan **kredit pangan**, penguatan produksi domestik, dan hilirisasi pangan. Ini adalah pengakuan implisit bahwa daya tahan harga pangan memerlukan pembiayaan sektor riil, peningkatan kapasitas produksi, dan kelembagaan pasokan yang lebih kuat. ([Bank Indonesia](#))

Pada titik ini, persoalan inflasi pangan sebenarnya bertemu dengan persoalan pembangunan ekonomi yang lebih luas: produktivitas

pertanian, kualitas infrastruktur, pendalaman pembiayaan, data pasar, dan tata kelola antarlembaga. Jika produktivitas pertanian stagnan, petani lemah modal, dan distribusi mahal, maka harga pangan akan mudah bergejolak. Bagi rumah tangga, yang terlihat hanyalah harga beras atau cabai yang naik. Tetapi di belakang itu, ada persoalan sistemik yang berkaitan dengan desain pembangunan. ([Bank Indonesia](#))

### **6. Daya Beli: Bukan Sekadar Pendapatan Naik atau Turun**

Sering muncul anggapan bahwa selama pendapatan nominal bertambah, maka daya beli otomatis membaik. Dalam praktiknya, hal ini terlalu sederhana. BPS mencatat bahwa rata-rata upah buruh pada Agustus 2025 naik **1,94 persen** dibanding Agustus 2024, menjadi **Rp3,33 juta** per bulan. Kenaikan ini tentu positif. Namun bila harga pangan pada akhir 2025 masih tumbuh **4,25–4,58 persen** dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan tekanan volatile food tetap kuat pada awal 2026, maka bagi rumah tangga yang pengeluarannya didominasi kebutuhan pangan, kenaikan upah nominal itu belum tentu cukup menimbulkan rasa aman. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah penting membedakan indikator rata-rata dengan pengalaman distribusional. Secara agregat, BPS menunjukkan bahwa **pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan** naik dari **Rp12,3 juta** menjadi **Rp12,8 juta** pada 2025. Ini menunjukkan perbaikan rata-rata kesejahteraan riil. Akan tetapi, rata-rata selalu menyembunyikan variasi. Rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi biasanya memiliki porsi belanja pangan yang lebih kecil, sehingga mereka lebih tahan terhadap guncangan harga makanan. Sebaliknya, rumah tangga miskin dan rentan lebih cepat merasakan tekanan karena struktur anggaran mereka jauh lebih sempit. Maka, peningkatan indikator rata-rata nasional tidak boleh

dibaca seolah-olah seluruh kelompok masyarakat mengalami perbaikan daya beli dengan derajat yang sama. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam kehidupan nyata, rumah tangga sering menyesuaikan diri bukan dengan menambah pendapatan secara cepat, melainkan dengan **mengubah pola konsumsi**. Mereka mengganti lauk, menurunkan kualitas beras, mengurangi frekuensi membeli protein hewani, menekan belanja transportasi, atau menunda pembelian obat dan keperluan sekolah. Penyesuaian semacam ini membuat indikator kemiskinan tidak selalu langsung memburuk, tetapi kualitas hidup dapat menurun secara diam-diam. Inflasi pangan karena itu mempunyai dampak yang sering kali lebih besar daripada yang tercermin dalam data headline inflation. ([World Bank](#))

## **7. Inflasi Pangan, Kemiskinan, dan Kelompok Rentan**

Kaitan antara inflasi pangan dan kemiskinan sangat kuat. BPS melaporkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi **8,47 persen** pada Maret 2025 dan turun lagi menjadi **8,25 persen** pada September 2025. Jumlah penduduk miskin pun menurun dari **23,85 juta** orang pada Maret 2025 menjadi **23,36 juta** orang pada September 2025. Ini adalah perkembangan yang baik. Namun angka-angka tersebut justru mengingatkan bahwa masih ada lebih dari dua puluh tiga juta penduduk hidup dekat atau di bawah batas minimum pengeluaran dasar, sehingga gejolak harga pangan dapat dengan cepat menghambat kemajuan pengentasan kemiskinan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada Maret 2025, garis kemiskinan nasional rata-rata berada di **Rp609.160** per kapita per bulan. Pada September 2025, search snippet BPS menunjukkan garis kemiskinan naik menjadi **Rp641.443** per kapita per bulan, atau meningkat sekitar **5 persen lebih** dibanding Maret 2025. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa biaya memenuhi kebutuhan dasar juga meningkat. Dengan kata lain, agar tidak jatuh

miskin, rumah tangga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mencapai standar minimum konsumsi. Dalam konteks seperti itu, inflasi pangan bukan sekadar memperberat rumah tangga miskin, tetapi juga mendorong rumah tangga rentan semakin dekat ke jurang kemiskinan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

World Bank secara eksplisit menekankan bahwa **bantuan sosial** akan membantu membatasi dampak yang tidak proporsional dari kenaikan harga pangan terhadap rumah tangga rentan. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa problem inflasi pangan bukan semata isu efisiensi pasar, tetapi juga isu perlindungan sosial. Ketika harga pangan naik, kelompok yang paling terpuak bukan hanya mereka yang miskin secara resmi, melainkan juga kelompok "nyaris miskin" yang pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka sering tidak memiliki tabungan memadai, tidak terlindungi oleh pekerjaan formal, dan sangat sensitif terhadap guncangan harga. ([World Bank](#))

### **8. Kota dan Desa: Dua Wajah Kerentanan yang Berbeda**

Inflasi pangan tidak dirasakan dengan cara yang sama di perkotaan dan perdesaan. BPS menunjukkan bahwa pada 2025 porsi pengeluaran untuk makanan di perdesaan mencapai **56,85 persen**, jauh lebih tinggi daripada perkotaan **46,04 persen**. Data kemiskinan pun menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan, baik pada Maret 2025 maupun September 2025. Dengan demikian, gejolak harga pangan di desa cenderung lebih berbahaya karena ia menimpa rumah tangga yang anggarannya lebih sempit dan ketergantungannya pada makanan lebih besar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun kota juga memiliki kerentanannya sendiri. Pada Maret 2025, BPS mencatat bahwa kemiskinan perkotaan justru naik dibanding September

2024, sementara kemiskinan perdesaan menurun. Ini memberi isyarat bahwa rumah tangga kota sangat terpapar pada biaya hidup, termasuk pangan, perumahan, dan transportasi. Di kota, rumah tangga miskin dan rentan biasanya bergantung hampir seluruhnya pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan; mereka tidak memiliki kebun, lahan, atau cadangan bahan makanan sendiri. Karena itu, setiap kenaikan harga komoditas pangan langsung terasa dalam kas rumah tangga harian. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara naratif, petani kecil di desa dan buruh informal di kota sama-sama bisa terdampak, tetapi melalui mekanisme yang berbeda. Petani kecil mungkin memperoleh harga jual lebih tinggi ketika harga naik, tetapi belum tentu menikmati keuntungan bersih bila produktivitas rendah, biaya input tinggi, atau mereka justru menjadi pembeli neto untuk komoditas lain. Buruh informal di kota hampir selalu menjadi pembeli neto pangan. Karena itu, desain kebijakan tidak boleh seragam. Stabilisasi harga umum penting, tetapi intervensi untuk kota dan desa harus mempertimbangkan struktur pendapatan, akses produksi, dan saluran distribusi yang berbeda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

## **9. Dampak terhadap Gizi, Kualitas Konsumsi, dan Modal Manusia**

Salah satu dampak paling serius dari inflasi pangan sering kali tidak langsung terlihat dalam statistik makro, yaitu menurunnya **kualitas konsumsi**. Saat harga naik, rumah tangga biasanya tidak pertama-tama berhenti makan; mereka mengubah apa yang mereka makan. Protein hewani dikurangi, variasi buah dan sayur dipersempit, makanan bergizi diganti dengan sumber kalori yang lebih murah. Dalam jangka pendek, strategi ini tampak rasional karena membantu anggaran bertahan. Namun dalam jangka panjang, pola ini dapat merusak kualitas gizi keluarga, terutama anak-anak. ([World Bank](#))

Implikasi ini penting bagi Indonesia karena pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia. Rumah tangga yang terus-menerus tertekan oleh harga pangan akan lebih sulit menyediakan diet yang seimbang. Akibatnya, tekanan harga dapat berubah menjadi masalah modal manusia: anak kurang gizi, kesehatan menurun, produktivitas kerja melemah, dan beban kesehatan jangka panjang meningkat. Inflasi pangan karena itu memiliki efek antargenerasi. Apa yang tampak sebagai gejolak harga hari ini dapat berubah menjadi kerugian produktivitas nasional di masa depan. ([World Bank](#))

#### **10. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Penting pula untuk melihat bahwa inflasi pangan bukan hanya masalah distribusi rumah tangga, tetapi juga masalah pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga tetap merupakan salah satu penopang utama ekonomi Indonesia. BPS mencatat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh **5,11 persen** pada 2025, dan pada triwulan III-2025 konsumsi rumah tangga serta PMTB tetap menjadi komponen besar dalam perekonomian. Jika daya beli tertekan karena belanja pangan menyerap semakin besar bagian dari anggaran rumah tangga, maka ruang konsumsi untuk barang dan jasa lain akan menyempit. Artinya, inflasi pangan pada akhirnya dapat menekan permintaan domestik yang justru menjadi tumpuan pertumbuhan Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara sederhana, uang yang tersedot untuk menutup kenaikan harga beras, ayam, cabai, atau minyak goreng adalah uang yang tidak jadi dibelanjakan untuk pakaian, pendidikan tambahan, rekreasi, perbaikan rumah, atau tabungan. Pada skala mikro, ini adalah penyesuaian anggaran rumah tangga. Pada skala makro, ini berarti komposisi konsumsi bergeser ke kebutuhan bertahan hidup, bukan ke konsumsi

yang lebih beragam dan produktif. Jika fenomena ini berlangsung luas, maka kualitas pertumbuhan juga terdampak. Ekonomi mungkin tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya menjadi kurang inklusif dan kurang nyaman dirasakan masyarakat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itulah inflasi pangan sering memunculkan paradoks politik-ekonomi: indikator makro dapat tetap tampak baik, tetapi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi justru melemah. Bukan karena data makro salah, melainkan karena rumah tangga menilai ekonomi dari pengalaman belanja hariannya. Selama pangan masih menyerap porsi sangat besar dari pengeluaran, persepsi ekonomi masyarakat akan sangat ditentukan oleh apakah harga kebutuhan pokok terasa stabil atau tidak. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

### **11. Mengapa Inflasi Umum Terkendali Tidak Cukup?**

Bank Indonesia menegaskan bahwa inflasi 2026–2027 diyakini akan tetap dalam sasaran **2,5±1 persen**, setelah faktor basis pada awal 2026 mereda. IMF juga menilai headline inflation Indonesia masih well anchored. Secara kebijakan moneter, ini adalah pencapaian penting. Namun untuk kasus Indonesia, stabilitas headline inflation belum cukup bila inflasi pangan masih berulang-ulang menjadi sumber kekhawatiran utama masyarakat. Dengan kata lain, **keberhasilan moneter perlu dilengkapi oleh keberhasilan sistem pangan.** ([Bank Indonesia](#))

Masalahnya, inflasi pangan sering tidak sepenuhnya tunduk pada instrumen suku bunga. Suku bunga dapat membantu menambatkan ekspektasi inflasi, menjaga nilai tukar, dan mencegah lonjakan permintaan berlebihan. Tetapi suku bunga tidak bisa memanen cabai, memperbaiki jalan distribusi, menambah cold storage, atau menghilangkan hujan ekstrem. Karena itu, penanganan inflasi pangan harus lebih luas daripada kebijakan moneter. Ia memerlukan koordinasi

sektor pertanian, perdagangan, logistik, pangan, perlindungan sosial, dan pemerintah daerah. Pengalaman Indonesia dengan TPIP dan TPID justru menunjukkan bahwa tata kelola inflasi pangan bersifat multidimensi. ([Bank Indonesia](#))

## 12. Respons Kebijakan yang Sudah Berjalan

Bank Indonesia dan pemerintah pusat-daerah telah menekankan beberapa langkah utama. Dalam siaran pers Maret 2026, BI menyebut penguatan strategi **3K**—kebijakan terintegrasi, kolaborasi dengan pemerintah, dan komitmen menjaga stabilitas—serta strategi **4K** untuk inflasi pangan: **keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan**. BI juga menyebut tujuh program unggulan, antara lain **hilirisasi pangan, kerja sama antardaerah, operasi pasar murah**, dan penguatan ekspektasi inflasi. Selain itu, BI mendorong **kredit pangan** dan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial yang juga diarahkan ke sektor prioritas termasuk pertanian, industri, hilirisasi, dan UMKM. ([Bank Indonesia](#))

Langkah-langkah ini mengandung logika yang benar. Operasi pasar dan bantuan pangan penting untuk meredam gejolak jangka pendek. Kerja sama antardaerah penting untuk menutup kesenjangan pasokan. Kredit pangan penting agar sektor hulu tidak terus lemah modal. Komunikasi kebijakan penting agar ekspektasi inflasi tidak memburuk. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuannya bergerak dari pemadaman kebakaran menuju reformasi sistemik. ([Bank Indonesia](#))

Pemerintah juga pada 2025 memperluas langkah-langkah perlindungan sosial, termasuk **bantuan pangan dan transfer tunai**, sebagaimana dicatat World Bank. Kebijakan seperti ini penting karena membantu menjaga konsumsi rumah tangga rentan ketika harga naik. Namun ia

pada dasarnya adalah peredam dampak, bukan penyelesaian akar masalah. Bantuan sosial harus tetap ada dan lebih tepat sasaran, tetapi tidak boleh menjadi substitusi bagi pembenahan produksi, distribusi, dan efisiensi sistem pangan nasional. ([The World Bank](#))

### **13. Arah Kebijakan: Menjaga Daya Beli dengan Perspektif Sistem**

Untuk jangka pendek, prioritas utamanya tetap stabilisasi harga dan perlindungan kelompok rentan. Ini berarti operasi pasar harus responsif, bantuan sosial harus tepat sasaran, dan cadangan pangan harus cukup untuk menahan gejolak musiman. Di saat yang sama, pemantauan harga dan distribusi perlu lebih real time, terutama menjelang Ramadan, Idulfitri, Natal, tahun baru, atau saat gangguan cuaca meningkat. Kebijakan komunikasi juga penting agar masyarakat dan pelaku pasar tidak terjebak pada ekspektasi yang terlalu pesimistis. ([Bank Indonesia](#))

Untuk jangka menengah, kebijakan harus bergeser ke penguatan **kapasitas produksi** dan **produktivitas**. Kredit pangan yang disebut BI perlu diterjemahkan ke pembiayaan yang benar-benar menjangkau petani, peternak, pelaku distribusi, dan UMKM pengolahan. Indonesia tidak akan pernah benar-benar aman dari inflasi pangan bila sektor hulunya rapuh, bergantung pada pola tanam tradisional semata, minim asuransi, dan kurang didukung teknologi pascapanen. Stabilisasi harga harus dibangun di atas pasokan yang lebih tangguh, bukan hanya intervensi harga sesaat. ([Bank Indonesia](#))

Untuk jangka panjang, Indonesia membutuhkan reformasi **sistem pangan nasional**. Ini mencakup perbaikan infrastruktur distribusi, pengurangan biaya logistik, penguatan cold chain, pengembangan data pasar yang lebih akurat, insentif untuk diversifikasi produksi, dan integrasi kebijakan pusat-daerah. Relevan pula mendorong hilirisasi pangan dalam arti yang sehat: bukan sekadar pengolahan industri, tetapi

pembentukan rantai nilai yang lebih kuat dari petani ke pasar, dari sentra produksi ke kota konsumsi, dan dari komoditas segar ke produk yang lebih tahan simpan. Jika rantai nilai pangan lebih efisien dan lebih dalam, volatilitas harga pun akan lebih mudah dikelola. ([Bank Indonesia](#))

#### **14. Perlindungan Sosial sebagai Penyangga Daya Beli**

Salah satu pelajaran penting dari pengalaman beberapa tahun terakhir adalah bahwa perlindungan sosial tidak boleh dipisahkan dari stabilisasi harga pangan. World Bank menegaskan bahwa bantuan sosial dapat membatasi dampak tidak proporsional dari kenaikan harga pangan terhadap rumah tangga rentan. Ini sangat relevan bagi Indonesia, karena jutaan rumah tangga berada pada posisi rentan: tidak miskin secara resmi, tetapi cukup dekat ke garis kemiskinan sehingga sedikit guncangan harga saja dapat mengganggu keseimbangan anggaran mereka. ([World Bank](#))

Perlindungan sosial yang efektif dalam konteks inflasi pangan setidaknya memerlukan tiga hal. Pertama, **ketepatan sasaran**: mereka yang paling rentan harus menerima bantuan lebih dulu. Kedua, **ketepatan waktu**: bantuan harus hadir saat gejolak harga sedang terjadi, bukan setelah tekanan mereda. Ketiga, **ketepatan bentuk**: di beberapa kasus bantuan tunai lebih fleksibel, di kasus lain bantuan pangan lebih efektif, tergantung jenis tekanan harga dan karakter rumah tangga penerima. Bila ketiga unsur ini berjalan baik, maka inflasi pangan tidak serta-merta berubah menjadi krisis kesejahteraan. ([World Bank](#))

#### **15. Peran Daerah dan Pentingnya Koordinasi**

Karena Indonesia sangat besar dan beragam, inflasi pangan hampir tidak pernah murni persoalan nasional yang seragam. Ia sering merupakan akumulasi dari banyak persoalan lokal: panen gagal di satu daerah, gangguan transportasi di daerah lain, distribusi yang tersendat ke kota

tertentu, atau lonjakan permintaan musiman di wilayah tertentu. Karena itu, **TPID** menjadi penting. Kebijakan nasional dapat memberi arah, tetapi keberhasilan di lapangan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah membaca komoditas strategis di wilayahnya dan merespons lebih cepat daripada pasar bereaksi secara berlebihan. ([Bank Indonesia](#))

Kerja sama antardaerah juga perlu diperkuat sebagai instrumen permanen, bukan sekadar solusi insidental. Bila suatu daerah surplus cabai, bawang, telur, atau ayam dan daerah lain defisit, maka mekanisme kerja sama pasokan harus berjalan sebelum lonjakan harga terjadi. Pendekatan seperti ini jauh lebih sehat daripada menunggu harga naik lalu melakukan intervensi darurat. Dalam ekonomi kepulauan seperti Indonesia, koordinasi antardaerah adalah bagian dari strategi makro, bukan detail administratif semata. ([Bank Indonesia](#))

## **16. Inflasi Pangan, Persepsi Publik, dan Kepercayaan terhadap Ekonomi**

Ada satu dimensi lain yang sering diabaikan: **persepsi publik**. Masyarakat tidak menilai ekonomi hanya dari laporan pertumbuhan atau sasaran inflasi. Mereka menilai dari seberapa jauh pendapatan hari ini masih bisa membiayai kebutuhan kemarin. Karena itu, inflasi pangan punya kekuatan simbolik yang besar. Ketika harga cabai, beras, atau telur naik, yang berubah bukan hanya struktur pengeluaran, tetapi juga rasa aman rumah tangga terhadap masa depan. Inilah sebabnya isu pangan hampir selalu menjadi indikator emosional ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan menjadi penting. Bank Indonesia menempatkan komunikasi sebagai salah satu unsur strategi 4K. Ini tepat, sebab rumah tangga dan pasar perlu diyakinkan bahwa

pemerintah memahami masalah dan memiliki instrumen untuk menanganinya. Tanpa komunikasi yang kredibel, gejolak harga dapat memperbesar kecemasan sosial dan menimbulkan kesan bahwa negara kehilangan kendali, walaupun secara teknis berbagai langkah stabilisasi sedang dijalankan. ([Bank Indonesia](#))

### **17. Dari Stabilisasi Harga ke Ketahanan Pangan Ekonomi**

Esensi kebijakan yang lebih maju seharusnya bukan hanya “menurunkan harga sesaat”, tetapi membangun **ketahanan pangan ekonomi**. Ketahanan ini berarti rumah tangga tidak terlalu mudah terpukul ketika harga pangan naik, dan sistem pasokan nasional tidak terlalu mudah goyah ketika terjadi gangguan cuaca, distribusi, atau permintaan musiman. Untuk mencapainya, Indonesia memerlukan kombinasi kebijakan: produktivitas hulu, pembiayaan, logistik, perlindungan sosial, pengelolaan stok, dan data yang lebih baik. ([Bank Indonesia](#))

Dalam jangka panjang, keberhasilan mengendalikan inflasi pangan akan menjadi indikator penting kualitas pembangunan Indonesia. Negara yang ekonominya tumbuh tetapi pangan tetap sering bergejolak berarti belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan dasarnya. Sebaliknya, negara yang dapat menjaga pangan tetap terjangkau, sekaligus mempertahankan insentif yang layak bagi produsen, sedang membangun fondasi pertumbuhan yang lebih inklusif. Ini karena daya beli yang terjaga bukan hanya membantu konsumsi hari ini, tetapi juga menopang stabilitas sosial dan kualitas modal manusia esok hari. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

### **Penutup**

Pada akhirnya, inflasi pangan di Indonesia harus dipahami sebagai persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar naik-turunnya indeks harga. Ia adalah masalah yang menyentuh struktur pengeluaran rumah

tangga, pola gizi, kemiskinan, persepsi terhadap ekonomi, dan kualitas pertumbuhan nasional. Data 2025–2026 memperlihatkan dengan jelas bahwa ketika inflasi umum tampak relatif terkendali, pangan tetap dapat menjadi sumber tekanan utama: **headline inflation Desember 2025 sebesar 2,92 persen**, tetapi kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** mencapai **4,58 persen**; pada **Februari 2026**, kelompok pangan terkait masih mengalami inflasi **3,51 persen**, sementara **volatile food** mencapai **4,64 persen** secara tahunan. Fakta ini menjelaskan mengapa banyak rumah tangga tetap merasa tertekan, walaupun narasi makro ekonomi terlihat lebih tenang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pada 2025 hampir **49,42 persen** pengeluaran per kapita nasional masih dialokasikan untuk makanan, dan di perdesaan mencapai **56,85 persen**. Artinya, inflasi pangan langsung mengenai pos pengeluaran terbesar masyarakat. Dalam situasi demikian, kenaikan upah nominal yang terbatas, meskipun positif, belum tentu cukup untuk menghadirkan rasa aman pada rumah tangga. Daya beli bukan sekadar masalah apakah pendapatan naik, melainkan apakah pendapatan itu masih mampu membeli kebutuhan pokok dengan kualitas hidup yang layak. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya menjaga inflasi umum dalam sasaran, tetapi memastikan bahwa **stabilitas harga benar-benar dirasakan pada meja makan rumah tangga**. Ini menuntut pendekatan yang menyeluruh: stabilisasi harga jangka pendek, penguatan perlindungan sosial, pembiayaan pangan, peningkatan produksi domestik, efisiensi distribusi, dan koordinasi pusat-daerah yang lebih kuat. Bila semua ini dilakukan dengan konsisten, maka pengendalian inflasi pangan tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga

memperkuat fondasi pertumbuhan Indonesia yang lebih adil, lebih tangguh, dan lebih manusiawi. ([Bank Indonesia](#))

Berikut **Glosarium** dan **Referensi** untuk esai “**Inflasi Pangan dan Daya Beli Masyarakat: Tantangan Nyata Ekonomi Indonesia.**”

Secara konteks, topik ini penting karena pada **Desember 2025** inflasi umum Indonesia tercatat **2,92 persen**, tetapi kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** mencapai **4,58 persen**; lalu pada **Februari 2026** kelompok yang sama masih mengalami inflasi **3,51 persen**, sementara inflasi **volatile food** menurut Bank Indonesia mencapai **4,64 persen**. Pada saat yang sama, porsi pengeluaran makanan dalam konsumsi rumah tangga Indonesia masih besar, yakni sekitar **49,42 persen** secara nasional, **46,04 persen** di perkotaan, dan **56,85 persen** di perdesaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

## **Glosarium**

**Inflasi pangan:** kenaikan harga komoditas pangan yang dikonsumsi rumah tangga, baik bahan pangan segar maupun pangan olahan dasar. Dalam konteks Indonesia, inflasi pangan penting karena kelompok pengeluaran makanan masih menyerap porsi besar dari anggaran rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Daya beli:** kemampuan riil rumah tangga untuk membeli barang dan jasa setelah mempertimbangkan tingkat harga yang berlaku. Daya beli tidak hanya ditentukan oleh pendapatan nominal, tetapi juga oleh perubahan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. ([BPS Web API](#))

**Inflasi umum / headline inflation:** tingkat kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara keseluruhan. Pada Desember 2025 headline inflation Indonesia tercatat 2,92 persen secara tahunan, tetapi tekanan pangan berada di atas angka tersebut. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Kelompok makanan, minuman, dan tembakau:** salah satu kelompok pengeluaran dalam IHK BPS yang sering menjadi indikator penting untuk membaca tekanan biaya hidup sehari-hari. Pada Februari 2026 kelompok ini mengalami inflasi 3,51 persen secara tahunan. ([BPS Web API](#))

**Volatile food:** komponen harga pangan yang sangat bergejolak karena sensitif terhadap cuaca, musim, distribusi, dan lonjakan permintaan musiman. Bank Indonesia mencatat inflasi volatile food Februari 2026 sebesar 4,64 persen secara tahunan. ([Bank Indonesia](#))

**Inflasi inti / core inflation:** komponen inflasi yang relatif lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi gejolak harga pangan segar atau harga yang diatur pemerintah. Inflasi inti sering dipakai untuk melihat tekanan inflasi yang lebih mendasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Administered prices:** kelompok harga yang sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah, seperti tarif listrik atau harga yang diatur. Pada awal 2026, BI menekankan bahwa headline inflation dipengaruhi faktor basis dari kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025. ([Bank Indonesia](#))

**Low base effect:** fenomena statistik ketika angka pertumbuhan tahunan tampak tinggi karena basis pembanding tahun sebelumnya sangat rendah. BI menggunakan istilah ini untuk menjelaskan bagian dari kenaikan inflasi tahunan Februari 2026. ([Bank Indonesia](#))

**Garis kemiskinan:** batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. BPS mencatat garis kemiskinan nasional rata-rata sebesar Rp609.160 per kapita per bulan

pada Maret 2025 dan Rp641.443 pada September 2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Rumah tangga rentan:** rumah tangga yang belum tentu masuk kategori miskin resmi, tetapi sangat mudah terdorong ke bawah garis kemiskinan ketika terjadi guncangan harga, pendapatan, atau pekerjaan. Dalam konteks inflasi pangan, kelompok ini sangat penting karena tidak selalu terlindungi cukup kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Pengeluaran per kapita untuk makanan:** proporsi belanja makanan dalam total pengeluaran rumah tangga per orang. Semakin besar proporsinya, semakin besar pula sensitivitas rumah tangga terhadap inflasi pangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**TIIP/TPID:** Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang berperan dalam koordinasi pengendalian inflasi, terutama untuk komoditas pangan. BI menekankan sinergi TIIP/TPID sebagai bagian penting pengendalian volatile food. ([Bank Indonesia](#))

**Strategi 4K:** pendekatan pengendalian inflasi pangan yang menekankan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan. Strategi ini menjadi salah satu kerangka utama koordinasi pengendalian inflasi pangan Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

**Bantuan sosial:** transfer tunai, bantuan pangan, atau bentuk perlindungan sosial lain untuk menjaga konsumsi rumah tangga rentan. World Bank menilai bantuan sosial penting untuk membatasi dampak tidak proporsional dari kenaikan harga pangan terhadap kelompok rentan. ([The World Bank](#))

**Daya beli riil:** kemampuan konsumsi yang telah disesuaikan dengan perubahan harga. Daya beli riil bisa menurun walaupun upah nominal naik, jika harga pangan naik lebih cepat daripada pendapatan. ([BPS Web API](#))

## Referensi

**Badan Pusat Statistik.** (2026, 5 Januari). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen.* Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Badan Pusat Statistik.** (2026, 1 Maret). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2026.* Badan Pusat Statistik. ([BPS Web API](#))

**Bank Indonesia.** (2026, 3 Maret). *Inflasi IHK Februari 2026 Tetap Terkendali.* Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

**Badan Pusat Statistik.** (2025/2026). *Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Klasifikasi Desa, 2025.* Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Badan Pusat Statistik.** (2025, 5 November). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Badan Pusat Statistik.** (2025, 25 Juli). *Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun.* Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Badan Pusat Statistik.** (2025/2026). *Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Daerah.* Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**Badan Pusat Statistik.** (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen.* Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

**International Monetary Fund.** (2026, 21 Januari). *IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation with Indonesia.* IMF. ([Bank Indonesia](#))

**World Bank.** (2025, Juni). *Indonesia Economic Prospects: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia*. World Bank. ([The World Bank](#))

**World Bank.** (2025, Desember). *Indonesia Economic Prospects*. World Bank. ([World Bank](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 4 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a77cb3-4224-839e-9326-8adaae34c9c3>